



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

RAPAT KOMISI IX DPR RI

(Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan))

Tahun Sidang : 2019-2020
Masa Persidangan : II
Rapat ke : 6
Jenis Rapat : Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat
Dengan : 1. Menteri Kesehatan RI
2. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)
3. Dewan Pengawas BPJS Kesehatan
4. Direktur Utama BPJS Kesehatan
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/tanggal : Senin, 20 Januari 2020
Pukul : 14.00 WIB – selesai
Acara : 1. Membahas mengenai Pembiayaan Selisih Biaya Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III;
2. Membahas mengenai Pembayaran Hutang Klaim Rumah Sakit dan Penanggulangan Defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan Tahun 2019.
Ketua Rapat : Felly Estelita Runtuwene, SE/Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat : Yanto Supriyanto/ Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Lantai I
Gedung Nusantara I
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Hadir : A. 44 orang dari 51 orang Anggota Komisi IX DPR RI;
B. Menteri Kesehatan RI, Letjen TNI (Purn) Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad, beserta jajaran;
C. Ketua DJSN, Tubagus Achmad Choesni M.Phil, beserta jajaran;
D. Ketua Dewan Pengawasan BPJS Kesehatan dr. Chairul Radjab Nasution, M.Kes, beserta jajaran;

E. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Dr.dr. Fachmi Idris,
M.Kes, beserta jajaran;

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI dan Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Direktur Utama BPJS Kesehatan dan Ketua DJSN dibuka pukul 14.18 WIB, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 251 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat telah memenuhi kuorum dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Berdasarkan kesimpulan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat pada tanggal 12 Desember 2019 tidak dapat dilaksanakan, maka Komisi IX DPR RI meminta Menteri Kesehatan RI, Ketua DJSN, Direktur Utama BPJS Kesehatan dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi mencari solusi atas kenaikan iuran BPJS Kesehatan sesuai Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, khususnya bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III.
2. Komisi IX DPR RI akan mengagendakan kembali Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan RI dan RDP dengan Ketua DJSN, Direktur Utama BPJS Kesehatan dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 untuk membahas solusi atas kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.20 WIB.

Jakarta, 20 Januari 2020

KETUA RAPAT/
KETUA KOMISI IX DPR RI,

Ttd.

FELLY ESTELITA RUNTUWENE, SE
A-393